

HARIAN

MERDEKA

aspirasi rakyat



KEJAKSAAN TI
DKI JAKARTA

TERKAIT DUGAAN PERJALANAN DINAS FIKTIF

KEJATI DKI DIDESAK PERIKSA DIRUT BANK MANDIRI

JAKARTA |
Harian Merdeka

Kasus penyaluran pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Crowde Membangun Bangsa serta persoalan pemblokiran rekening Cheng Hua dan Supriyono alias Botok menjadi sorotan publik.

Namun, perhatian terhadap Bank Mandiri kini juga melebar pada dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pegawai.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas Bank Mandiri sekaligus dugaan ad-

anya perjalanan dinas fiktif yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menurut Uchok, anggaran perjalanan dinas Bank Mandiri pada 2025 tercatat mencapai sekitar Rp260,7 miliar,

Bersambung ke
Halaman 11

Target LP2B Nasional Tembus 87,52 Persen

SLEMAN | Harian Merdeka

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat pencapaian target Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hingga 2026, LP2B secara nasional telah melampaui target 87% yang

Bersambung ke
Halaman 11

Tim Gabungan Cari Rombongan Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

PANDEGLANG | Harian Merdeka

Polda Banten bersama Basarnas hingga kini masih terus melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat dalam perjalanan menuju kawasan Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan, rombongan jurnalis berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita,



Bersambung ke
Halaman 11

TANGERANG | **Harian Merdeka**

Asmudiyanto Ketua Umum Satria Muda menjelaskan bahwa surat laporan yang telah di kirimkan memakai tanda terima dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan Terkait proyek Penataan Taman Villa Cinere Mas, APBD tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan.

“Sebagai masyarakat tentu kami punya batasan untuk menentukan dua alat bukti, karena hal itu tugasnya kejaksan untuk melakukan penyelidikan dan memeriksa semua yang terkait,” tutur Asmudiyanto pada Selasa, [8/9/ 2026]

Menurutnya, Kejaksaan diharapkan dapat transparan atas informasi, apakah ada perubahan kontrak mengacu gambar, jika penyelidikan dapat menyeluruh maka hasil pekerjaan banyak dugaan terdapat kekurangan item volume dan fakta harus uji lapangan oleh pemeriksaan penyidik, “harapnya

Walau demikian, apakah pihak kejaksan Tangerang Selatan ingin memastikan, apakah ada perubahan kontrak pekerjaan yang tidak sesuai dengan DED, sehingga perlu pengembangan ke Inspektorat Kota Tangerang Selatan,” ucapnya singkat.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan (Tangsel) Ronny Bona Tua Hutagalung membenarkan, terdapat surat laporan (Dumas) LSM Satria Muda Nomor : 5571 pada tanggal 27 Juli 2026.

Ia juga menyampaikan, terhadap aduan tersebut bahwa telah ditindak lanjuti oleh Kejaksaan

Dinas LH Dilaporkan, Begini Keterangan Kasi Intel Kejari Tangsel

Tangerang Selatan dan telah membuat telaah pada Bidang Intelijen.

“Berdasarkan gakta tim intelijen telah menyimpulkan, belum dapat di buktikan kebenaran yang disampaikan oleh pihak pelapor (Satria Muda) sehingga belum di temukan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT),” ujar Ronny Bona Tua Hutagalung di ruang kerjanya pada Selasa 8 September 2026.

Ronny menegaskan, belum ditemukan bukti yang cukup atas Dumas LSM Satria Muda, atas Penataan Taman Villa Cinere oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan

“Belum ditemukan bukti yang cukup atas perbuatan melawan hukum dan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada Dinas Lingkungan Hidup di Pemerintah Kota Tangerang Selatan,” tegasnya.

Sehingga kata Ronny, perlu dilakukan pendalaman oleh pihak Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan berkaitan bentuk dokumen aduan dimaksud, sudah di serahkan juga ke pihak Inspektorat Kota Tangerang Selatan.

“ Karena laporan berbentuk Dumas oleh LSM Satria Muda, adalah bentuk dugaan Jadi kita mendorong ke pihak Inspektorat dalam hal ini APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dengan Surat Nomor B 4077



Kepala Seksi Intelijen Kejari Tangerang Selatan Ronny Bona Tua Hutagalung pada Selasa 8/9/ 2026.

pada 14 Agustus 2026,” ucapnya.

Kasi Intel Asal Sumatra Utara tersebut menambahkan, intinya pihaknya bangga dan senang dengan adanya pengawasan ekstra dari teman-teman media dan masyarakat terkait penataan administrasi maupun pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah “Tentu bangga dan senang dengan adanya ekstra pengawasan dari rekan media dan LSM, karena kami tidak dapat memantau selama 24 jam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah,” ungkap Ronny kepada HARIAN MERDEKA.

Diakhir keterangannya Ronny berharap, kepada masyarakat jika ingin

membuat laporan pengaduan, mohon agar melengkapi laporan dimaksud dengan minimum dua alat bukti, dengan kata lain, “Kenali Hukum dan Jauhi Hukuman”.

“Semoga masyarakat dapat melengkapi dua alat bukti tambahan untuk laporan maupun dumas, Kejaksaan Tangerang Selatan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, kalau kurang alat bukti akan mengakibatkan kesulitan dalam pembuktian perkara. Sehingga kami juga perlu melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP untuk mendalami fakta administrasi untuk menjawab apakah ada kerugian keuangan negara,” pungkasnya. ● (Rhm)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA, Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H. Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabirol Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

MAKI Desak KPK Jemput Paksa Dua Tersangka Anggota DPR



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI)-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp28,38 miliar.

MAKI berharap KPK segera menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan terhadap dua tersangka Anggota DPR, Satori dari Nasdem dan Heri Gunawan dari Gerindra yang sebelumnya mangkir.

“Segera jadwalkan ulang pemeriksaan terhadap tersangka. Ini sudah terlalu lama kasusnya dibiarkan tanpa ada kepastian hukum,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa 8 September 2026.

Boyamin menilai dua Anggota DPR yang menjadi tersangka bisa dijemput paksa jika nantinya tidak menghadiri panggilan kedua KPK.

Menurut dia, penjemputan paksa terhadap seorang tersangka yang telah dipanggil

dua kali tetapi tidak datang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kalau tidak hadir dua kali, maka satu-satunya hukum yang diberikan oleh KUHAP kita, perundang-undangan kita adalah upaya paksa, yaitu diterbitkan surat perintah membawa,” ujar Boyamin.

MAKI berharap KPK tidak menerus melakukan buying time atau mengulur-ngulur waktu, serta menebar janji terus akan menahan dua tersangka korupsi CSR BI.

“Proses hukum tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, harus ada kepastian hukum. Tahan tersangka dan segera limpahkan ke tahap selanjutnya agar perkaranya bisa segera disidangkan,” tandasnya.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat. Kemudian, KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah meng-

geledah sejumlah lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Beberapa lokasi tersebut seperti Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka kasus tersebut. Keduanya saat ini merupakan anggota DPR periode 2024-2029.

Namun, hingga kini kasusnya masih berlarut-larut. Satori dan Heri Gunawan tak kunjung ditahan, meskipun penetapan tersangka keduanya sudah lebih dari satu tahun.

Tidak hanya itu keduanya juga mangkir dari panggilan KPK. Satori mangkir dari pemeriksaan KPK pada Senin 31 Agustus 2026, sementara Heri Gunawan mangkir pada pemeriksaan Kamis, 11 Juni 2026. ● (Egi)

Bareskrim Terapkan Moratorium Kasus Konflik Agraria

JAKARTA |
Harian Merdeka



Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono menyatakan Polri menanggukkan sementara atau memperlakukan moratorium terhadap penanganan semua perkara tindak pidana yang berkaitan dengan konflik agraria struktural.

Hal itu dilakukan berkaitan dengan adanya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Menurut dia, kebijakan itu merupakan penyelarasan visi pihaknya dengan lembaga legislatif, dengan mempedomani kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI pada 26 Agustus 2026.

“Kami telah mengambil langkah strategis dengan memberlakukan moratorium atau penangguhan sementara terhadap seluruh penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural,” kata Syahar saat rapat dengan Badan Legislasi DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, moratorium itu diterapkan karena konflik agraria tidak selalu merupakan persoalan pidana. Konflik agraria, kata dia, juga dapat berkaitan dengan persoalan keperdataan dan hak masyarakat adat.

Untuk itu, dia memastikan bahwa Polri akan mengedepankan penyelesaian konflik melalui mediasi dan keadilan restoratif. Selain itu, dia juga menerapkan penundaan proses pidana untuk perkara yang memiliki keterkaitan dengan perjuangan hak atas tanah.

“Sementara itu, dalam menyikapi esensi perjuangan hak atas tanah yang kental dengan aspek keperdataan maupun adat, Polri secara konsisten mengedepankan asas penundaan proses pidana prejudisial,” kata dia.

Menurut dia, Polri akan mempedomani amanat Peraturan Kemendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mensyaratkan agar pengakuan itu dilakukan melalui proses kelembagaan oleh panitia masyarakat hukum adat bentukan kepala daerah, yang mencakup tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi hingga pada akhir-akhirnya penetapan status masyarakat hukum adat. ● (Egi)

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah (Pemda) terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (8/9/2026). Rakor yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut membahas percepatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT.

Rakor turut melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta para bupati dan jajaran Pemda dari delapan kabupaten di Pulau Flores. Tujuh kabupaten yang mengikuti rakor merupakan daerah terdampak gempa bumi, sedangkan satu kabupaten lainnya terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

Dalam rakor tersebut, Mendagri meminta Pemda mempercepat realisasi bantuan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera

Percepat Penyaluran Bantuan Bencana NTT, Mendagri 'Sentil' Pemda



terpenuhi.

"Untuk Gubernur saya memberikan apresiasi karena dapat anggaran bantuan dari Pak Presiden, untuk Belanja Tidak Terduga 40 miliar, sudah bisa dieksekusi, realisasikan untuk membantu masyarakat dengan cepat, itu 43 persen. Ada juga yang 27 persen, 25 persen," ujar Mendagri kepada awak media usai memimpin rakor tersebut.

Mendagri juga mendorong daerah yang realisasi bantuan bencananya masih rendah agar segera mempercepat penyal-

uran. Menurutnya, bantuan perlu segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih berada di tempat pengungsian maupun tenda darurat. Dukungan Pemda diperlukan untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh kebutuhan dasar, termasuk makanan, pakaian, serta kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak.

"Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda misalnya, karena

takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak," sambung Mendagri.

Selain penyaluran bantuan, rakor juga membahas penanganan hunian bagi warga terdampak bencana. Dalam konteks tersebut, Mendagri meminta Pemda melakukan pendataan kerusakan, terutama pada rumah warga, sembari menunggu kondisi di lapangan semakin stabil.

Pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk bantuan dan pembangunan kembali rumah warga. Mendagri meminta proses verifikasi dilakukan secara berlapis agar data kerusakan akurat dan bantuan tepat sasaran. Validasi juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan dalam klasifikasi tingkat kerusakan rumah. Setelah data dinyatakan valid, pemerintah akan menentukan bentuk bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan. ● (Agus)

26 Pemda Papua Belum Cairkan Dana Otsus Tahap II, Wamendagri Ribka Tagih Komitmen

JAKARTA |
Harian Merdeka

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menagih komitmen dan keseriusan pemerintah daerah (Pemda) di enam provinsi se-Tanah Papua dalam mengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II Tahun Anggaran 2026.

Hingga awal September 2026, tercatat sebanyak 26 daerah belum juga melengkapi berkas administrasi pencairan, sehingga penyaluran dana pembangunan untuk masyarakat terancam tertunda.

"Pemerintah pusat sudah

siap untuk melayani, tinggal sekarang tergantung kepada pemerintah daerah. Cepat dan lambatnya penyaluran atau realisasi Dana Otsus, semua kembali kepada pemerintah daerah," tegas Ribka saat ditemui di ruangannya, Jakarta, Selasa (8/9/2026) siang.

Ribka menjelaskan, pemerintah pusat telah mempermudah syarat penyaluran Tahap II. Pemda tidak dituntut mempertanggungjawabkan 100 persen penggunaan anggaran Tahap I, melainkan cukup minimal 50 persen realisasi yang disertai laporan kinerja, capaian keluaran, serta lapo-

ran penggunaan SiLPA dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun anggaran sebelumnya.

"Minimal 50 persen. Tidak diminta 100 persen, 50 persen saja pertanggungjawaban atau SPJ, itu syarat agar tahap dua segera disalurkan," jelasnya.

Ia menambahkan, penyusunan laporan pertanggungjawaban tersebut sebetulnya tidak rumit apabila program kegiatan benar-benar dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sejak awal.

"Kalau kegiatan itu benar-benar dilaksanakan di daerah sesuai dengan



perencanaan, sebenarnya tidak terlalu susah. Apa yang sudah dikerjakan, tinggal dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Adapun 26 Pemda yang belum memenuhi persyaratan tersebut tersebar di enam provinsi, meliputi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua,

Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ribka mendesak para gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah-wilayah tersebut untuk mengambil langkah cepat agar manfaat dana tidak tertunda.

● (Agus)

3 Instansi Rapat Bareng Buddha Tzu Chi Bahas Penanganan Bencana



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat koordinasi penting bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan perwakilan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia pada Selasa (8/9/2026) sore. Rapat yang dimulai pukul 15.30 WIB ini

berfokus pada percepatan penanganan pascabencana dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.

Ada tiga poin utama yang menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan tertutup tersebut. Pertama, koordinasi penanganan dampak bencana alam di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, penanganan khusus un-

tuk kawasan terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang juga berada di wilayah NTT.

Selain membahas situasi di Indonesia Timur, rapat ini juga mengevaluasi perkembangan proyek Hunian Tetap (Huntap) di wilayah Aceh dan Sumatra.

Kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, Kemendagri, dan organisasi kemanusiaan seperti Buddha Tzu Chi ini diharapkan dapat mempercepat birokrasi, penyaluran bantuan, serta pembangunan infrastruktur rumah tinggal yang layak bagi para pengungsi korban bencana.

"Karena itu arahan Presiden yang jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda, misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian, atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu dan anak-anak,"

ucap Mendagri.

Sementara itu, Menteri PKP meminta percepatan penanganan bencana di NTT dilakukan dengan tetap memperhatikan keamanan lokasi relokasi bagi masyarakat.

"Jangan kita memindahkan rakyat dari tempat yang tidak aman ke tempat yang tidak aman juga," katanya.

Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan pembangunan rumah melalui skema gotong royong. Untuk penanganan di NTT, pemerintah menyiapkan pembangunan 500 rumah serta bantuan sebesar Rp5 miliar.

Selain penanganan bencana di Flores dan Lewotobi, rapat juga membahas percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Sumatera.

Pemerintah terus mempercepat proses pembangunan, termasuk penyelesaian pengadaan dan pelelangan proyek huntap. Koordinasi dengan BPKP dan LKPP akan dilakukan untuk mempercepat proses tersebut.

● (Egi)

BNPB: Abu Anak Krakatau Mengarah ke Laut Hindia, Lampung-DKI Mulai Kondusif

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebaran abu vulkanik pascaerupsi Gunung Anak Krakatau saat ini cenderung bergerak ke arah Laut Hindia. Kondisi tersebut membuat wilayah Lampung, Banten, Jawa, Barat hingga DKI Jakarta kini lebih kondusif dari sebaran abu.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan arah sebaran abu mengikuti arah angin yang saat ini bergerak ke barat. Berdasarkan analisis citra satelit, kecepatan angin

di sekitar Gunung Anak Krakatau mencapai 15 knot.

"Kalau kita lihat signifikan meteorologisnya, bahwa saat ini abu vulkanik tersebut lebih cenderung mengarah ke Laut Hindia," ujar Berton dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

"Dari informasi tersebut, kita dapat tahu bahwa sekarang ini keadaan di Lampung dan Jawa Barat maupun Banten, DKI termasuk di dalamnya, lebih kondusif dari abu vulkanik," tambahnya.

Meski kondisi sebaran abu sudah lebih kondusif, Berton mengingatkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga. Karena

itu, masyarakat ataupun wisatawan tetap dilarang beraktivitas dalam radius tiga kilometer.

Bertalian dengan itu, BNPB terus melakukan operasi untuk menangani dampak abu vulkanik dan polutan di udara. Pada Senin (7/9), BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) melalui metode cloud seeding atau penyemaian awan.

Operasi tersebut dilakukan dengan menyemai awan yang berpotensi menghasilkan hujan di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam operasi itu, BNPB menggunakan pesawat untuk menyebarkan sekitar 650 liter air yang dicampur dengan 350 kilogram kal-



sium klorida (CaCl_2).

"Dilakukan penyemprotan air yang bercampur dengan kalsium klorida yang ditujukan pada awan yang berpotensi terjadi hujan di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah," katanya.

Sementara pada Selasa, 8 September 2026, BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca dengan metode water mist.

Dilakukan dengan menyemprotkan air yang dicampur surfaktan untuk membantu menangkap lapisan polutan di udara.

Dalam operasi tersebut, BNPB menggunakan sekitar 2.000 liter air yang dicampur dengan surfaktan.

"Sesuai bahan yang disampaikan itu adalah 2.000 liter air ditambah dengan surfaktan," pungkasnya. ● (Agus)

DPR Minta KLH Lapor Polisi Terkait Dugaan Manipulasi Data Air Limbah Jababeka

JAKARTA |
Harian Merdeka

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk melaporkan dugaan manipulasi data hasil pengujian baku mutu air limbah ke kepolisian.

“Kita minta diproses, lapor Polri, usut tuntas. Masukkan di kesimpulan,” kata Bambang dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI bersama KLH/BPLH di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa dini hari.

Permintaan itu disampaikan setelah Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan memaparkan hasil verifikasi lapangan terkait operasional Kawasan Industri Jababeka Tahap II.

Rizal mengatakan pihaknya menemukan pipa pembuangan milik PT Jababeka Tbk yang telah berusia 36 tahun tidak mendapatkan perawatan rutin selama tiga tahun sejak 2023.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) internal yang mewajibkan pemeliharaan berkala setiap bulan pada titik-

“Implikasinya adalah pipa berumur 36 tahun tanpa adanya pemeliharaan pada titik rawan, manhole sambungan, itu akan menaikkan risiko kegagalan struktur dan potensial terjadinya kebocoran ataupun pencemaran berulang,”

Rizal Irawan
Deputi Bidang Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup KLH/BPLH

titik rawan, termasuk lubang kontrol (manhole).

“Implikasinya adalah pipa berumur 36 tahun tanpa adanya pemeliharaan pada titik rawan, manhole sambungan, itu akan menaikkan risiko kegagalan struktur dan potensial terjadinya kebocoran ataupun pencemaran berulang,” kata Rizal.

Selain itu, KLH/BPLH menemukan indikasi ketidakwajaran dalam perubahan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan PT Media Lab terhadap air limbah Jababeka.

Menurut Rizal, laporan awal mencatat kebutuhan oksigen kimawi (Chemical Oxygen Demand/COD) sebesar 810 miligram per liter (mg/L), sedangkan baku mu-

tunya maksimal 100 mg/L.

Sementara kebutuhan oksigen biologis (Biological Oxygen Demand/BOD) dalam laporan awal tercatat 289 mg/L, sedangkan baku mutunya maksimal 20 mg/L.

Namun, sekitar satu pekan kemudian, PT Media Lab menerbitkan surat revisi yang mengubah hasil pengujian COD menjadi 63 mg/L dan BOD menjadi 19 mg/L sehingga keduanya berada di bawah baku mutu.

“Selama ini kami bertahun-tahun melakukan verifikasi lapangan, itu belum pernah ada kejadian adanya revisi dengan jarak ini kurang lebih seminggu. Ada indikasi bahwa biar di bawah baku mutu semua,” ujar Rizal.

Menanggapi temuan tersebut, Bambang menduga perubahan hasil pengujian laboratorium itu merupakan upaya untuk membuat perusahaan seolah-olah memenuhi ketentuan baku mutu.

Ia meminta KLH/BPLH menindaklanjuti dugaan tersebut dan melaporkannya kepada kepolisian untuk diusut.

“Kalau tadi Pak Deputi saja tidak percaya, apalagi DPR kan? Kita minta diproses, lapor Polri, usut tuntas,” kata Bambang.

Menurut dia, dugaan perubahan hasil laboratorium tersebut merupakan persoalan serius karena dapat memengaruhi kredibilitas pengawasan lingkungan dan penegakan hukum.

● (Egi)



Deddy Sitorus Baca Pesan AHY untuk Prabowo: Demokrat Mulai Bidik Pilpres 2029?



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang memiliki batas waktu mulai memantik tafsir politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menilai pidato AHY tersebut berpotensi mengandung pesan politik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Deddy, pernyataan mengenai kekuasaan yang tidak bersifat permanen dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Partai Demokrat mulai mempersiapkan posisi politik menghadapi kontestasi nasional berikutnya.

Deddy melihat ada kemungkinan pesan tersebut berkaitan dengan peluang AHY maupun Demokrat untuk mengambil posisi lebih strategis dalam peta politik menuju Pilpres 2029.

“Kalau kita membaca pesan politiknya, kekuasaan itu ada batasnya dan tidak selamanya,” demikian substansi yang ditafsirkan Deddy dari pernyataan AHY.

Bagi Deddy, narasi tersebut dapat dimaknai sebagai pengingat kepada seluruh kekuatan politik, termasuk pemerintahan Prabowo,

bahwa konstelasi kekuasaan pada akhirnya akan berubah.

Dengan demikian, menurut tafsir Deddy, Demokrat ingin memastikan bahwa posisi AHY tidak diabaikan dalam perhitungan politik menuju 2029.

Sinyal Awal AHY Menuju 2029?

Pidato AHY tersebut muncul ketika pembicaraan mengenai kandidat Pilpres 2029 mulai mengemuka. Sejumlah pemberitaan bahkan menilai AHY memiliki peluang untuk kembali masuk dalam bursa kandidat presiden maupun wakil presiden.

AHY sendiri merupakan salah satu figur muda yang memiliki pengalaman politik sekaligus berada di lingkaran pemerintahan Prabowo.

Karena itu, setiap pernyataan politik AHY berpotensi mendapat perhatian lebih besar, khususnya ketika berbicara mengenai batas kekuasaan dan masa depan kepemimpinan nasional.

Namun, tafsir tersebut tidak otomatis berarti Demokrat telah mengambil keputusan untuk berhadapan dengan Prabowo pada Pilpres 2029.

Partai Demokrat justru menegaskan bahwa pidato AHY mengenai kekuasaan tidak berkaitan langsung dengan Pilpres 2029. Demokrat menyebut AHY sedang menyampaikan pesan mengenai

tanggung jawab dan pentingnya menjalankan amanah kekuasaan.

Prabowo Mulai Diberi Sinyal?

Di sinilah pernyataan Deddy menjadi menarik.

Jika dibaca sebagai komunikasi politik, pesan tentang kekuasaan yang memiliki batas waktu dapat menjadi pengingat bahwa dukungan politik hari ini belum tentu identik dengan konfigurasi politik lima tahun mendatang.

Demokrat sendiri saat ini berada dalam pemerintahan Prabowo. Namun, dalam politik, hubungan koalisi pemerintahan tidak selalu berarti kesamaan kepentingan dalam menghadapi pemilu berikutnya.

Dengan Pilpres 2029 yang masih beberapa tahun lagi, partai-partai politik memiliki ruang untuk membangun kekuatan, meningkatkan elektabilitas kader, sekaligus membaca peluang koalisi baru.

Dalam konteks itu, AHY menjadi salah satu nama yang patut diperhitungkan.

PDIP Baca Ada Peta Baru
Pernyataan Deddy juga menunjukkan bahwa kubu PDIP ikut mencermati gerak politik Demokrat.

Jika Demokrat benar-benar mulai mempersiapkan AHY sebagai kandidat 2029, peta persaingan politik nasional berpotensi menjadi semakin dinamis. Namun, sejauh ini belum ada keputusan resmi bahwa AHY akan maju sebagai calon presiden pada 2029.

Karena itu, pernyataan mengenai “kekuasaan ada batasnya” masih berada dalam wilayah tafsir politik.

Yang jelas, pidato tersebut telah membuka ruang.

● (Egi)



Petani NasDem Matangkan Rakernas 2026, Fokus Dongkrak Ekonomi Petani-Nelayan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

DPP Petani NasDem menggelar rapat internal di NasDem Tower, Senin (7/9), untuk mematangkan persiapan pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dijadwalkan 22–23 Oktober 2026.

Ketua Umum Petani NasDem Arif Rahman mengatakan, pelantikan akan digelar di NasDem Tower, sementara itu Rakernas berlangsung di Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem. Pada hari kedua, sejumlah kementerian akan diundang untuk memberikan kuliah umum kepada peserta.

Menurut Arif, Rakernas tidak hanya membahas program, tetapi juga menggali potensi daerah agar dapat dikembangkan menjadi usaha yang memberikan dampak ekonomi bagi petani dan nelayan.

“Kita tidak hanya bicara program, tetapi bagaimana program tersebut berkelanjutan dan punya dampak serta manfaat secara ekonomi terhadap petani dan nelayan,” ujar Arif yang juga Anggota Komisi IV DPR RI.

Salah satu gagasan yang akan dibahas adalah pembentukan Kebun NasDem di setiap wilayah sebagai bagian dari pengembangan potensi pertanian dan usaha masyarakat.

Arif menambahkan, Petani NasDem juga akan mendorong sinergi dengan sejumlah program pemerintah, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Tani Hutan.

“Bagaimana program pemerintah ini bisa menjadi ekosistem usaha dan bisnis yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat petani dan nelayan,” katanya. ● (Egi)

Syifa Hadju 'Kampanye' Ramah Lingkungan

JAKARTA |
Harian Merdeka

Syifa Hadju gak cuma bersinar di layar, tapi juga di kegiatan sosial. Baru-baru ini dia terlibat dalam kampanye edukasi tentang menstruasi dan pola hidup ramah lingkungan dari sekolah ke sekolah di Jakarta.

Program edukasi ini merupakan bentuk aksi sosial bintang film Catatan Si Boy (2023) itu buat masyarakat, terutama sesama perempuan. Menekankan pentingnya untuk menjaga bumi dengan menggunakan produk dengan material yang berkelanjutan.

"Aku selalu usahakan bawa tumbler dan tote bag sendiri buat mengurangi plastik sekali pakai, mengurangi penggunaan kertas dengan beralih ke skrip digital, misalnya, dengan tablet daripada harus dicetak," kata Syifa Hadju dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa (8/9/2026).

Kebiasaan baik Syifa Hadju itu membuatnya digaet sebagai Brand Ambassador Charm, yang berkolaborasi dengannya untuk menyuarakan hidup ramah lingkungan ke siswi SMA di Jakarta. Lewat program School to School Extra Maxi, Syifa dan Charm memberikan panduan praktis yang gampang ditiru.

Informasi penting untuk memahami dampak konsumsi produk harian terhadap lingkungan juga jadi salah satu agenda kampanye ini. Syifa berharap para siswi yang terlibat bisa mulai mengubah kebiasaan mereka dari hal-hal terkecil.

"Sebisa mungkin pilih produk ramah lingkungan, termasuk pembalut. Charm sudah bertahun-tahun meluncurkan pembalut seperti itu. Aku percaya perubahan besar buat bumi dan lingkungan bisa dimulai dari kes-

eharian kita," ungkapnya lagi.

Riset internal Charm menyebutkan, remaja perempuan saat ini sudah peduli terhadap lingkungan dan mulai selektif dalam memilih produk. Hampir 30% responden dalam riset tersebut bersedia membayar lebih mahal buat produk pembalut yang ramah lingkungan.

Lebih lanjut, 25% responden juga menjadikan faktor ramah lingkungan sebagai pertimbangan utama mereka membeli produk sanitasi wanita. Hal ini membuktikan remaja masa kini sudah aware dengan usaha menjaga lingkungan.

"Program edukasi School to School Extra Maxi hadir membawa misi yang lebih besar, yaitu menginspirasi generasi muda untuk membiasakan gaya hidup ramah lingkungan sejak dini demi melestarikan masa depan bumi. Kehadiran logo 'Ethical Living for SDGs' pada kemasan Charm Extra Maxi Bio Materials Eco Friendly Package diharapkan mampu membangun kesadaran dan rasa bangga pada konsumen bahwa pilihan mereka membawa dampak baik bagi Bumi," kata Presiden Direktur Unicharm, Yasutaka Nishioka. ● (dth)

“Aku selalu usahakan bawa tumbler dan tote bag sendiri buat mengurangi plastik sekali pakai, mengurangi penggunaan kertas dengan beralih ke skrip digital, misalnya, dengan tablet daripada harus dicetak,”

Syifa Hadju



KPK Dorong LHKPN Jadi Dasar Perampasan Aset, Harta Tak Wajar Bisa Disita?

JAKARTA |
Harian Merdeka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi dapat diperkuat sebagai salah satu dasar dalam mekanisme perampasan aset melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, penguatan LHKPN menjadi penting untuk menelusuri kekayaan penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan laporan resmi. Terlebih, masih ditemukan kemungkinan adanya pejabat yang melaporkan harta kekayaannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

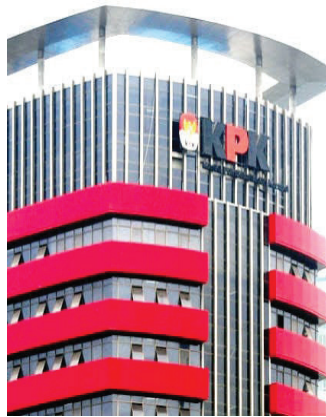
Tanak menjelaskan, konsep tersebut dapat dikaitkan dengan non-conviction based asset forfeiture (NCB Asset Forfeiture), yaitu mekanisme perampasan aset yang dalam kondisi tertentu dapat dilakukan tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya putusan pidana terhadap pemilik aset.

"Setiap penyelenggara negara itu wajib melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN. Tapi pada kenyataannya, ada yang melaporkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya," kata Tanak dalam sebuah diskusi organisasi wartawan, dikutip Rabu (9/9/2026).

Lapor Rp10 Miliar, Ditemukan Lebih Besar

Tanak memberikan ilustrasi sederhana mengenai mekanisme yang tengah didorong tersebut.

Menurut dia, apabila seorang pejabat melaporkan kekayaannya sebesar Rp10 miliar, tetapi kemudian



ditemukan aset dengan nilai lebih besar, selisih kekayaan tersebut dapat dipersoalkan apabila pemiliknya tidak mampu menjelaskan sumber perolehannya secara sah.

"Kalau dia bilang harta saya hanya Rp10 miliar, ternyata kemudian ditemukan lebih dari Rp10 miliar, ya yang lebih itu dirampas. Karena dia sendiri sudah mengakui bahwa hartanya hanya Rp10 miliar," ujarnya.

Namun, Tanak menegaskan bahwa mekanisme tersebut bukan berarti setiap aset yang tidak tercantum dalam LHKPN otomatis dapat dirampas.

Pemilik aset tetap diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan serta membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh melalui sumber yang sah.

"Kalau dia bisa membuktikan bahwa itu pemberian, hibah, atau sumber lain yang sah, ya silakan. Itu yang harus dibuktikan," tutur Tanak.

KPK Ingin Pejabat Lebih Jujur

KPK menilai penguatan LHKPN melalui RUU Perampasan Aset dapat memberikan efek pencegah terhadap penyelenggara negara agar tidak menyembunyikan atau mengecilkan nilai kekayaannya.

Dengan adanya konsekuensi hukum yang lebih kuat, pejabat negara diharapkan lebih

berhati-hati ketika melaporkan aset dan sumber kekayaannya.

"Kalau LHKPN ini diperkuat dengan non-conviction based asset forfeiture, saya kira tidak akan ada lagi ASN atau penyelenggara negara yang berani melaporkan hartanya tidak sesuai dengan kenyataan," kata Tanak.

Selain berkaitan dengan pemberantasan korupsi, Tanak melihat penguatan LHKPN juga berpotensi memberikan dampak terhadap penerimaan negara, khususnya dalam aspek perpajakan.

Data kekayaan pejabat dapat menjadi salah satu rujukan untuk melihat kesesuaian antara harta, penghasilan, dan kewajiban perpajakan.

RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

Tanak mengatakan, KPK telah lama mengkaji konsep perampasan aset.

Bahkan, menurut dia, pembahasan mengenai konsep tersebut sudah menjadi perhatian sejak dirinya masih bertugas di Kejaksaan Agung.

Ia menilai RUU Perampasan Aset perlu segera dibahas dengan tetap memperhatikan prinsip hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Tanak, sejumlah mekanisme perampasan aset sebenarnya sudah tersedia dalam aturan yang ada, termasuk dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, pengaturannya dinilai masih perlu diperkuat agar mekanisme perampasan aset dapat dilakukan secara lebih komprehensif, termasuk mengakomodasi konsep NCB Asset Forfeiture.

Dorongan tersebut sekaligus menempatkan LHKPN sebagai instrumen yang lebih strategis dalam mengawasi kekayaan penyelenggara negara. ● (Agus)



Nama Empat Pejabat Kejagung Diduga Dicatut dalam Isu Rp40 Miliar, Kubu Febrie Buka Suara

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Isu dugaan aliran dana Rp40 miliar dalam perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjadi sorotan. Kali ini, kubu Febrie membuka kemungkinan adanya pencatutan nama sejumlah pejabat Kejaksaan Agung untuk membangun pengaruh atau meyakinkan pihak yang menyerahkan uang.

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, mengatakan penyebutan nama pejabat tinggi Kejaksaan Agung dalam isu tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa uang benar-benar diterima oleh orang yang namanya disebut.

Menurut Febri, ada kemungkinan seseorang mengklaim memiliki kedekatan atau akses kepada pejabat tertentu, kemudian menggunakan nama besar pejabat tersebut untuk meyakinkan pihak lain.

"Bisa jadi ada yang mengaku dekat dengan seseorang dan kemudian seolah-olah menggunakan pengaruh atau nama besar seseorang, padahal sebenarnya itu belum tentu terjadi," ujar Febri, Selasa (8/9/2026).

Uang Rp40 Miliar Disebut Diserahkan kepada Ferry Boboho

Febri mengungkapkan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pengusaha properti Tan Kian, uang yang menjadi pokok persoalan tersebut disebut diberikan kepada Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Dengan demikian, menurut kubu Febrie, perlu dibedakan antara siapa yang disebut menerima uang secara langsung dengan siapa yang namanya kemudian muncul dalam dugaan peruntukan uang tersebut.

Febri menegaskan, dalam BAP Tan Kian tidak terdapat pernyataan eksplisit bahwa uang Rp40 miliar itu diberikan kepada Febrie Adriansyah.

Tan Kian, menurut Febri, hanya menggunakan istilah yang menunjukkan kemungkinan atau dugaan ketika mengaitkan uang tersebut dengan empat nama pejabat di lingkungan Kejagung. ● (Agus)

Andra Soni Kenang Kebaikan KH Ahmad Fudholi

TANGERANG |
Harian Merdeka

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan duka cita atas wafatnya ulama KH Ahmad Fudholi. Andra Soni bertakziah ke rumah duka di Kampung Rimpak Kulon, Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Senin (7/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni menyampaikan belasungkawa atas kepergian KH

Ahmad Fudholi yang dikenal sebagai salah satu ulama di Banten.

“Kami turut berduka cita atas berpulangnya guru kita, kiai karismatik Banten. Semoga almarhum husnul-khatimah. Tentu kita semua merasa sangat kehilangan,” ungkap Gubernur Andra.

Andra Soni mengajak masyarakat untuk mempertahankan dan meneladani berbagai kebaikan yang dilakukan almarhum selama hidupnya. Ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan.



“Hal-hal baik yang ada pada diri beliau harus kita jadikan

contoh dan kita ikuti bersama,” tambahnya.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimiyati Natakusumah turut menyampaikan duka atas wafatnya KH Ahmad Fudholi. Ia mendoakan agar amal ibadah almarhum diterima Allah SWT dan kesalahannya mendapatkan ampunan.

“Semoga keluarga diberikan kekuatan lahir batin, dan mudah-mudahan almarhum menjadi ahlu l-jannah,” tuturnya.

● (dam)

Bantuan Pesantren Diperluas! Maesyal Rasyid Cinta Santri

TANGERANG |
Harian Merdeka

Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai melaksanakan sekaligus menyosialisasikan program fasilitasi bantuan Asrama Pondok Pesantren (Aspontren) dan Sanitasi Berbasis Pesantren (Sanitren) Tahun Anggaran 2026.

Program tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan pondok pesantren, khususnya fasilitas asrama dan sanitasi.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, mengatakan pembangunan dan perbaikan fasilitas pesantren perlu dilakukan secara berkelanjutan agar para santri memperoleh lingkungan belajar yang layak.

“Hari ini di tempat ini dilaksanakan sosialisasi sekaligus juga memulai melaksanakan program pembangunan asrama pondok pesantren, juga melanjutkan program Sanitren yang ada di Kabupaten Tangerang. Tahun ini untuk penerima manfaat Aspontren sebanyak 150 pondok pesantren dan Sanitren sebanyak 50 pondok pesantren. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dua bulan bisa beres semuanya di wilayah Kabupaten Tangerang,”



kata Maesyal saat dimintai keterangan, Selasa (08/09/2026).

Menurut Maesyal, pembangunan sarana fisik pesantren merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap proses pendidikan dan pembentukan generasi penerus.

“Aspontren dan Sanitren ini penting sekali, kita bangun untuk meningkatkan semangat belajar para santri-santri yang akan melanjutkan perjuangan para kiai, para ustaz, dan para ustazah yang ada di Kabupaten Tangerang,” tandasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung terciptanya

lingkungan belajar yang nyaman dan sehat bagi para santri.

“Pembangunan ini bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakatnya supaya para santri yang mondok bisa mandiri, nyaman belajar, beribadah, dan menimba ilmu di pondok pesantren masing-masing. Tadi saya sampaikan bahwa santri adalah masa depan pemimpin yang insyaallah akan bagus juga. Para santri ini, insyaallah juga akan berjuang melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilaksanakan oleh para pimpinan pondok pesantrennya,” ujarnya.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Subulusallam Kresek sekaligus Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten Tangerang, Amal Faihan Maimun, mengapresiasi peningkatan alokasi bantuan bagi pondok pesantren.

Menurutnya, penambahan alokasi bantuan diharapkan dapat memperluas penerima manfaat dan mendorong pemerataan pembangunan sarana pesantren.

“Alhamdulillah, hari ini kita mengikuti program fasilitasi bantuan Sanitren dan Aspontren dari Pemda Kabupaten Tangerang. Hari ini kami mendengar kabar baik. Setelah kami mengusulkannya, semula Aspontren ini

direncanakan selama lima tahun akan dibangun 750 asrama pondok pesantren. Namun kami mengusulkan bahwa jumlah pondok pesantren di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan ada 1.117. Maka kami mengusulkan pemerataan supaya semuanya bisa tersentuh mendapatkan bantuan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima, jumlah pembangunan Aspontren direncanakan meningkat pada 2027 hingga mencapai sekitar 1.000 asrama pondok pesantren.

“Alhamdulillah tadi kami mendapatkan informasi, insyaallah untuk tahun 2027 akan ditambahkan, sehingga akan mencapai seribu lebih asrama pondok pesantren yang akan dibangun oleh Pemda Kabupaten Tangerang. Kami mengapresiasi, berterima kasih, dan semoga ini semuanya berjalan lancar, semuanya tanpa ada hambatan apa pun,” ujarnya.

Amal juga berharap pelaksanaan pembangunan dengan mekanisme swakelola tetap mendapatkan pendampingan dari fasilitator yang ditunjuk pemerintah daerah, termasuk hingga tahap administrasi dan pelaporan.

● (hmi)

TIM GABUNGAN.....

pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB dengan menggunakan kapal speedboat untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Komunikasi terakhir dengan rombongan itu terjadi sekitar pukul 14.42 WIB, ketika salah satu anggota mengirimi lokasi terakhir kepada rekannya. Namun, sekitar pukul 15.04 WIB, komunikasi tidak dapat dilakukan lagi.

Titik dugaan terakhir rombongan tersebut berada di perairan Selat Sunda, dengan jarak sekitar 9,98 nautical mile dari RIB 02 BTN dan estimasi waktu tempuh sekitar 40 menit.

Adapun rombongan yang di-

laporkan hilang terdiri dari M. Bagus Khoirunnas yang merupakan jurnalis Antara, Ari Basuki jurnalis Merdeka, Yudhis jurnalis iNews, Daus jurnalis Anadolu, Donal yang berstatus jurnalis lepas, serta dua orang lain yang masih dalam proses pendataan.

Pencarian dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan adanya kapal yang membawa rombongan jurnalis belum kembali ke Dermaga Pagedongan, Carita.

Kombes Pol Maruli menyampaikan, tim gabungan telah bergerak mencari di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik terakhir komunikasi para jurnalis tersebut.

Polda Banten mengerahkan 23 personel dalam operasi pencarian, yang terdiri dari dua personel KP Sanjaya Mabes Polri, lima personel Ditpolairud Polda Banten, dan 16 personel Basarnas Banten. Selain itu, pencarian juga didukung oleh Kapal Basarnas KN Tetuka yang bergerak dari Dermaga Pelabuhan BBJ Bojonegara menuju perairan Carita dan selanjutnya ke lokasi pencarian.

Kondisi cuaca di sekitar lokasi pencarian dilaporkan cerah berawan, dengan arah angin dari selatan ke utara, kecepatan angin sekitar 16,7 knot, dan tinggi gelombang antara 0,4 hingga 1

meter. Namun, terdapat sebaran abu vulkanik yang membuat jarak pandang sekitar satu mil.

Maruli menegaskan, tim gabungan akan terus melakukan pencarian dan pemantauan terhadap perkembangan situasi di lapangan. Masyarakat juga diimbau tetap tenang serta tidak mendekati kawasan yang berpotensi membahayakan keselamatan.

"Kami bersama Basarnas akan terus melakukan upaya pencarian secara maksimal dan menyampaikan perkembangan informasi sesuai hasil di lapangan," ujar Maruli mengakhiri keterangannya. ● (Egi)

KEJATI DKI.....

sementara pada 2024 mencapai sekitar Rp264,3 miliar. Adapun pada 2023, kata Uchok, anggaran perjalanan dinas pegawai Bank Mandiri mencapai sekitar Rp221,5 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas perjalanan dinas dalam negeri sekitar Rp149,5 miliar dan perjalanan dinas luar negeri sekitar Rp71,9 miliar.

"Yang lebih menarik, perjalanan dinas pegawai Bank Mandiri diketahui bahwa bukti transportasi pada 23 unit kerja atas 41 kegiatan hanya berupa invoice dari travel agent," ujar Uchok, Selasa (8/9/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum. Ia meminta adanya pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak.

CBA, lanjut Uchok, mendorong Kejaksaaan Tinggi (Kejati) DKI

Jakarta untuk memanggil jajaran manajemen Bank Mandiri guna meminta penjelasan mengenai pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.

"Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Riduan, boleh dipanggil untuk meminta penjelasan dan surat penugasan, tiket, boarding pass, asuransi perjalanan, serta laporan kegiatan atas perjalanan dinas pegawai Bank Mandiri tersebut," tutur Uchok.

Ia menilai keberadaan invoice dari travel agent saja belum cukup untuk membuktikan bahwa perjalanan dinas benar-benar dilakukan. Menurutnya, dokumen pendukung seperti tiket dan boarding pass penting untuk memastikan keberadaan pegawai pada kegiatan yang dibiayai menggunakan anggaran perjalanan dinas.

"Dengan tidak ada bukti transportasi pada 23 unit kerja atas 41

kegiatan seperti tiket dan boarding pass, bisa diduga ini perjalanan dinas fiktif yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp9.164.713.909," lanjut Uchok.

Atas dugaan tersebut, CBA meminta aparat penegak hukum melakukan verifikasi dan audit secara menyeluruh terhadap dokumen perjalanan dinas, termasuk mencocokkan surat tugas, pembayaran kepada travel agent, tiket perjalanan, boarding pass, bukti hotel, laporan kegiatan, hingga pertanggungjawaban masing-masing pegawai.

Uchok menilai pemeriksaan diperlukan agar dugaan tersebut tidak berhenti sebatas temuan administratif. Ia pun mempertanyakan bagaimana Bank Mandiri dapat menjalankan visi sebagai institusi keuangan terbaik di Asia Tenggara apabila masih terdapat dugaan persoalan dalam penge-

lolaan anggaran internal.

"Bagaimana Bank Mandiri bisa menerapkan visinya sebagai Institusi Keuangan Terbaik di Asia Tenggara, kalau untuk perjalanan dinas saja banyak yang fiktif?" sindir Uchok.

Dugaan tersebut tentunya masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh pihak yang berwenang. Bank Mandiri juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan CBA tersebut, termasuk menjelaskan kelengkapan dokumen perjalanan dinas pada 23 unit kerja dan 41 kegiatan yang dimaksud.

Dengan nilai anggaran perjalanan dinas yang mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun, transparansi dan akuntabilitas menjadi penting untuk memastikan seluruh pengeluaran benar-benar berkaitan dengan kegiatan kedinasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. ● (Egi)

TARGET LP2B

semula disasar bisa tercapai pada akhir 2029. "Untuk LP2B, alhamdulillah saya benar bersyukur. Saya terima kasih banget sama tim dari BPN se-Indonesia. Belum selesai 2026, kita sekarang sudah berhasil mengunci LP2B secara nasional di tahun 2026. Belum sampai tahun 2029, jauh lebih cepat dari yang ditargetkan," ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Layanan Pertanahan di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (04/09/2026) lalu.

Berdasarkan data terbaru, pene-

tapan LP2B secara nasional sudah mencapai 87,52%. Angka tersebut melampaui target awal 87% yang ditetapkan untuk akhir 2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026.

Menurut Menteri Nusron, capaian tersebut menjadi langkah penting dalam menopang ketahanan pangan nasional. Sejumlah provinsi yang sebelumnya menghadapi tantangan untuk mencapai target juga telah berhasil memenuhi atau melampaui angka yang ditetapkan. Jawa Barat, misalnya, telah mencapai 87,02%, sementara Jawa Tengah dan

Sulawesi Selatan mencapai 88%.

Menteri Nusron menegaskan, tercapainya target LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) tidak berarti seluruh persoalan selesai. Pekerjaan berikutnya adalah menyusun kebijakan terkait pemanfaatan lahan sawah yang berada di luar kawasan LP2B agar alih fungsi lahan tetap terkendali.

Pengaturan tersebut juga akan menentukan jenis pemanfaatan yang dapat dilakukan terhadap 13% lahan sawah di luar LP2B. Pemanfaatannya tetap harus dibatasi agar keberadaan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan nasional dapat

dipertahankan. "Alih fungsi pada 13% lahan tersebut tidak berarti boleh dilakukan secara bebas. Boleh, tetapi terbatas," tegas Menteri Nusron.

Di depan para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN se-Indonesia dan 148 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) yang mengikuti Rakor, Menteri Nusron menekankan agar kebijakan perlindungan lahan sawah tersebut dipertahankan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencetak sekitar tiga juta hektare sawah baru di luar Pulau Jawa, termasuk di Papua dan Kalimantan Timur. ● (Egi)



The Sky Blues Menang

LISBON |
Harian Merdeka

Manchester City mengalahkan Porto 2-0 dalam pertandingan Liga Champions. Erling Haaland yang memborong seluruh gol The Sky Blues.

Matchday pertama Liga Champions menghadirkan Porto vs Man City. Pertandingan digelar di Estadio do Dragao, Rabu (9/9/2026) dini hari WIB.

Man City tampil dominan sepanjang 2x45 menit. Tim tamu mencatatkan 18 shots (10 on target) dan 60 persen penguasaan bola, unggul jauh ketimbang Porto yang cuma bikin 4 percobaan tembakan, semuanya gagal mengarah ke gawang, dan 40 persen ball possession.

Kendati demikian, Man City kesulitan membongkar pertahanan Porto di

babak pertama. Tim tuan rumah menahan imbang tanpa gol hingga turun minum.

Kebuntuan pecah memasuki babak kedua, tepatnya menit ke-47. Erling Haaland yang mencetak gol untuk Man City.

Haaland menanduk umpan pemain anyar Man City Enzo Fernandez. Bola sempat memantul ke tanah sebelum masuk ke dalam gawang Porto. The Citizens unggul 1-0.

BRACE! Man City menggandakan keunggulan pada awal injury time. Haaland kembali mencatatkan nama di papan skor.

Rayan Ait-Nouri mengirim umpan tarik dari sisi kiri serangan yang langsung disambar Haaland dengan tembakan menjadi gol. Skor berubah 2-0 untuk Man City dan jadi hasil akhir pertandingan.

● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp30.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**